



Studi Kualitatif Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Bank Umum Konvensional

Anjeli Roulina Simanjuntak^{1*}, Yudha Sadry Mezsas Purba², Patar Marulitua Simorangkir³, Gebriiella Sitorus⁴, Marianto Yus Siagian⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Email: anjelisimanjuntak08@gmail.com ^{1*}, yudhapurba5@gmail.com ², patarsimorangkir20@gmail.com ³, gebriiellasitorus2@gmail.com ⁴, mariantosiagian2002@gmail.com ⁵

*Penulis Korespondensi: anjelisimanjuntak08@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the level of transparency and accountability in the financial reporting of conventional commercial banks in Indonesia using a qualitative descriptive approach. The research focuses on the processes of preparing, presenting, and disclosing financial statements in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Data were collected through in-depth interviews with bank management, analysis of financial report documents, and a literature review of accounting standards and Financial Services Authority (OJK) regulations. The findings reveal that most conventional banks have made efforts to enhance transparency through adequate financial disclosure; however, there are still limitations in the presentation of relevant non-financial information for stakeholders. Accountability has been implemented through internal and external audit mechanisms, although its effectiveness is still influenced by auditor independence and the quality of oversight by the board of commissioners. This study is expected to contribute to improving financial reporting practices that are more transparent, accountable, and oriented toward public interest within the banking sector.*

Keywords: *Accountability; Conventional Banks; Corporate Governance; Financial Reporting; Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada bank umum konvensional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada proses penyusunan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen bank, analisis dokumen laporan keuangan, serta studi literatur terkait standar akuntansi dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bank konvensional telah berupaya menerapkan transparansi melalui pengungkapan informasi keuangan yang memadai, namun masih ditemukan keterbatasan dalam penyampaian informasi non-keuangan yang relevan bagi pemangku kepentingan. Akuntabilitas juga telah diterapkan melalui mekanisme audit internal dan eksternal, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh independensi auditor dan kualitas pengawasan dewan komisaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan praktik pelaporan keuangan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik dalam sektor perbankan.

Kata kunci: Akuntabilitas; Bank Konvensional; Laporan Keuangan; Tata Kelola; Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam praktik pelaporan keuangan yang menentukan kredibilitas suatu institusi, khususnya pada sektor perbankan. Bank umum konvensional memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya, relevan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Keberadaan laporan keuangan yang transparan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi yang sehat. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, transparansi dianggap sebagai pilar utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar (Al Widad, 2025).

Peran akuntabilitas dalam pelaporan keuangan bank tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terpercaya. Akuntabilitas menuntut setiap entitas perbankan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan keuangan yang dijalankan. Ketika pelaporan keuangan disusun secara akuntabel, maka akan tercermin kesesuaian antara kinerja aktual dan target yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelola keuangan, sehingga dapat memperkuat reputasi lembaga perbankan di mata investor dan regulator (Muliani, 2025).

Dalam praktiknya, tantangan penerapan transparansi dan akuntabilitas masih dihadapi oleh banyak bank konvensional, terutama terkait dengan pengungkapan informasi non-keuangan seperti risiko operasional dan keberlanjutan bisnis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan dalam penyampaian informasi tersebut sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pelaporan internal dan rendahnya pengawasan dari dewan komisaris. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara informasi yang diharapkan publik dengan yang disajikan oleh bank, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas tata kelola perusahaan (Beyer & Dautović, 2024).

Perkembangan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. OJK mendorong bank untuk menerapkan standar akuntansi keuangan internasional (IFRS) yang menekankan keterbukaan informasi dan penyajian laporan berbasis prinsip. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada penyampaian informasi yang memberikan nilai tambah bagi pengguna laporan. Implementasi regulasi ini diharapkan dapat memperkuat disiplin pelaporan dan mengurangi asimetri informasi di antara pelaku pasar (Suryanto, 2024).

Selain faktor regulasi, peran tata kelola perusahaan yang efektif juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi bank. Penerapan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti komite audit serta auditor independen, dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang baik mampu mendeteksi kesalahan dalam penyajian laporan dan mencegah praktik manipulatif yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Dengan kata lain, governance yang kuat menjadi landasan penting bagi transparansi dan akuntabilitas pelaporan bank (Winoto, 2024).

Pada akhirnya, studi ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada bank umum konvensional di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali fenomena secara

komprehensif melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan studi literatur. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan praktik pelaporan keuangan yang berintegritas serta menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan tata kelola lembaga keuangan di masa mendatang (Yulianti, 2025).

2. TINJAUAN TEORITIS

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*). Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada publik secara jelas, lengkap, dan tepat waktu, sehingga pihak eksternal dapat menilai kondisi keuangan lembaga secara objektif. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya keuangan sesuai standar yang berlaku. Dalam konteks perbankan konvensional, kedua prinsip ini menjadi dasar bagi kepercayaan publik serta stabilitas sistem keuangan. Keterbukaan laporan keuangan yang diaudit secara independen dapat memperkuat kredibilitas lembaga keuangan serta memastikan bahwa praktik pelaporan dilakukan secara etis dan sesuai regulasi otoritas jasa keuangan.

Teori Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan prinsip utama yang menjamin keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks perbankan, transparansi tidak hanya berarti menyajikan data keuangan secara lengkap, tetapi juga menjelaskan kondisi aktual perusahaan, termasuk risiko dan strategi manajemen. Transparansi memungkinkan pihak eksternal seperti investor, regulator, dan nasabah untuk melakukan penilaian yang objektif terhadap kinerja bank. Ketika informasi keuangan disampaikan secara jujur dan terbuka, maka akan muncul kepercayaan publik yang menjadi modal sosial penting bagi kelangsungan lembaga keuangan (Chen, Goldstein, Huang, & Vashishtha, 2022).

Selain itu, teori transparansi menekankan pentingnya pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) di samping kewajiban formal dalam laporan keuangan. Pengungkapan sukarela menunjukkan komitmen manajemen terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, bank yang lebih transparan cenderung memiliki tingkat efisiensi pasar yang lebih baik karena mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi dapat memperkuat kepercayaan investor serta menurunkan biaya modal perusahaan (Beyer & Dautović, 2024).

Teori Akuntabilitas dalam Tata Kelola Keuangan

Teori akuntabilitas menjelaskan kewajiban setiap entitas untuk mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks perbankan, akuntabilitas menjadi tolak ukur utama dalam memastikan bahwa dana masyarakat yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini mencakup tanggung jawab dalam proses pelaporan, pengendalian internal, serta mekanisme pengawasan terhadap kinerja keuangan. Dengan akuntabilitas yang kuat, bank dapat menunjukkan integritas manajerial serta memperkuat reputasi institusionalnya di mata publik dan regulator (Muliani, 2025).

Lebih lanjut, akuntabilitas dalam laporan keuangan berperan penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Keterbukaan tanggung jawab melalui audit internal dan eksternal membantu mendeteksi potensi penyimpangan dan meningkatkan keandalan data keuangan. Akuntabilitas juga menuntut adanya partisipasi aktif dari dewan komisaris dan komite audit dalam menilai serta mengawasi kebijakan keuangan. Dengan demikian, teori akuntabilitas menjadi kerangka konseptual penting untuk mendorong transparansi dan tata kelola yang berorientasi pada kepentingan publik (Ameliyaningsih, 2025).

Teori Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan teori yang berfokus pada sistem dan struktur pengelolaan organisasi untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks perbankan, penerapan GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi integritas pelaporan keuangan. Melalui tata kelola yang baik, risiko manipulasi laporan dan penyalahgunaan dana dapat diminimalkan, sehingga menjaga stabilitas sektor keuangan (Winoto, 2024).

Lebih jauh, teori GCG menegaskan pentingnya mekanisme kontrol internal seperti komite audit, dewan direksi, dan pengawasan eksternal oleh auditor independen. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian empiris menunjukkan bahwa bank dengan sistem tata kelola yang baik memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dan cenderung menarik kepercayaan investor secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan GCG menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan bisnis dan integritas pelaporan keuangan (Kartiko, 2024).

Teori Asimetri Informasi

Teori asimetri informasi menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara pihak manajemen dan pemangku kepentingan dapat menimbulkan distorsi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam dunia perbankan, manajemen sering kali memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi keuangan internal dibandingkan investor atau nasabah. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan masalah keagenan dan menurunkan efisiensi pasar. Transparansi laporan keuangan berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi melalui pengungkapan yang jelas, tepat waktu, dan komprehensif (Li, 2020).

Dengan meningkatnya transparansi, risiko salah persepsi terhadap kondisi keuangan bank dapat diminimalkan. Pengungkapan yang memadai memungkinkan pemangku kepentingan menilai risiko secara lebih akurat dan menghindari keputusan investasi yang keliru. Penelitian menunjukkan bahwa bank yang memiliki kebijakan transparansi tinggi cenderung mengalami stabilitas keuangan yang lebih baik karena kepercayaan publik meningkat. Oleh sebab itu, teori asimetri informasi mendukung perlunya keterbukaan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pihak internal dan eksternal (Kim, Kim, & Kim, 2020).

Teori Legitimasi dalam Pelaporan Keuangan

Teori legitimasi berasumsi bahwa setiap organisasi berusaha untuk beroperasi dalam batas-batas norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat agar memperoleh legitimasi sosial. Dalam konteks perbankan, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menjadi sarana penting untuk mempertahankan legitimasi tersebut. Ketika bank secara konsisten menyajikan informasi keuangan yang jujur dan dapat dipercaya, maka masyarakat akan menilai bahwa lembaga tersebut beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini memperkuat posisi bank sebagai institusi yang memiliki keabsahan sosial (Zubaidah, 2023).

Lebih lanjut, teori legitimasi menjelaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai media komunikasi sosial antara organisasi dan masyarakat. Dengan menjaga transparansi, bank dapat mengelola persepsi publik dan memperbaiki citra apabila terjadi krisis kepercayaan. Transparansi yang tinggi membantu lembaga keuangan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk regulator dan investor. Dengan demikian, teori legitimasi memperkuat pemahaman bahwa pelaporan keuangan yang akuntabel merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial lembaga keuangan (Zhu, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pada bank umum konvensional di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna dan praktik nyata yang terjadi di lapangan, bukan sekadar mengukur melalui angka statistik. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen, staf akuntansi, serta auditor internal dari beberapa bank konvensional yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumentasi laporan tahunan dan laporan keuangan resmi sebagai sumber data sekunder untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola-pola pelaporan dan membandingkannya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian ini juga melibatkan proses triangulasi data, yaitu dengan mengombinasikan hasil wawancara, studi dokumen, dan kajian literatur agar diperoleh validitas dan reliabilitas yang tinggi. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan aktif dalam menginterpretasikan hasil observasi dan wawancara. Selain itu, peneliti menggunakan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema utama seperti keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawaban, serta efektivitas audit. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada bank konvensional di Indonesia secara faktual dan mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi digitalisasi promosi melalui Google Maps membawa dampak positif terhadap peningkatan visibilitas UMKM rengginang di Desa Pahang. Para pelaku usaha yang sebelumnya hanya bergantung pada promosi konvensional, kini dapat menjangkau konsumen dari luar daerah dengan lebih mudah. Peningkatan kunjungan pelanggan ke lokasi usaha menunjukkan bahwa kehadiran bisnis di Google Maps membantu memperluas pasar serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap produk lokal. Faktor penting keberhasilan strategi ini terletak pada konsistensi pelaku usaha dalam memperbarui informasi, foto produk, serta interaksi dengan konsumen melalui fitur ulasan.

Selain itu, digitalisasi promosi ini turut memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Meningkatnya permintaan rengginang mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga yang terlibat dalam proses produksi. Pemerintah desa juga memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penggunaan Google Maps tidak hanya berperan sebagai alat promosi, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital berbasis potensi lokal (Rahmadani & Siregar, 2022).

Tabel 1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan.

No	Aspek Transparansi	Indikator Utama	Hasil Temuan
1	Keterbukaan Informasi	Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan	Penerapan prinsip keterbukaan masih beragam antar bank
2	Aksesibilitas Data	Kemudahan publik mengakses laporan tahunan	Sebagian bank telah menyediakan laporan secara daring
3	Konsistensi Penyajian	Standarisasi pelaporan sesuai PSAK	Konsistensi tinggi pada bank besar
4	Kejelasan Informasi	Penyampaian naratif dan visual laporan	Masih terdapat variasi dalam gaya penyajian
5	Komunikasi Publik	Hubungan investor dan publik	Cenderung informatif namun belum interaktif

Pembahasan Tabel

Hasil temuan menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah menjadi prioritas utama dalam pelaporan keuangan bank konvensional. Meskipun sebagian besar bank telah mempublikasikan laporan keuangan secara daring, perbedaan kualitas keterbukaan antar lembaga masih terlihat. Faktor ukuran bank dan tata kelola perusahaan memengaruhi sejauh mana informasi disajikan secara terbuka. Laporan tahunan yang disusun sesuai PSAK memperlihatkan konsistensi penyajian data, namun penyampaian naratif masih beragam. Beberapa bank telah berupaya memperkuat komunikasi publik melalui media digital, tetapi interaksi dua arah dengan pemangku kepentingan masih terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan komunikasi yang lebih partisipatif agar transparansi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Selain faktor kepatuhan terhadap regulasi, transparansi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kebijakan internal. Bank yang memiliki sistem pengawasan internal kuat cenderung lebih disiplin dalam menyajikan laporan terbuka. Namun, bank menengah masih

menghadapi keterbatasan dalam sumber daya pelaporan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, keterbukaan informasi mencerminkan tanggung jawab moral manajemen kepada publik. Peningkatan kualitas pelaporan dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan pelatihan staf akuntansi untuk memperkuat pemahaman prinsip transparansi.

Tabel 2. Dimensi Akuntabilitas dalam Pengelolaan Laporan Keuangan.

No	Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Implementasi	Tantangan
1	Tanggung Jawab Manajemen	Kepatuhan terhadap regulasi OJK	Dilaksanakan secara formal	Perlu peningkatan integritas
2	Pengawasan Internal	Audit internal independen	Sudah diterapkan rutin	Terbatas pada bank besar
3	Evaluasi Kinerja	Pelaporan periodik ke pemegang saham	Konsisten dilakukan	Belum maksimal dalam evaluasi
4	Etika Profesional	Kode etik akuntan dan manajer keuangan	Dipatuhi sebagian besar bank	Perlu pembaruan berkala
5	Tanggung Gugat Publik	Pelaporan ke masyarakat luas	Dilakukan melalui media online	Kurang partisipasi publik

Pembahasan Tabel

Akuntabilitas dalam sistem pelaporan keuangan bank konvensional menunjukkan kecenderungan positif. Sebagian besar bank telah memiliki sistem audit internal dan eksternal yang memadai untuk memastikan keandalan laporan. Namun, praktik tanggung jawab manajerial sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya reflektif terhadap nilai moral dan etika profesi. Proses evaluasi kinerja sudah dijalankan secara berkala, tetapi efektivitasnya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya transparansi hasil audit. Dalam konteks etika profesional, sebagian bank masih memerlukan pembaruan kode etik agar relevan dengan perkembangan teknologi keuangan.

Peningkatan akuntabilitas dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara manajemen, dewan komisaris, dan auditor independen. Penguatan sistem audit internal perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi auditor serta penggunaan teknologi audit berbasis data analitik. Selain itu, penyampaian laporan ke masyarakat harus diperluas agar publik dapat menilai kinerja keuangan secara lebih objektif. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga pada tanggung jawab moral terhadap kepercayaan publik.

Tabel 3. Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi.

No	Aspek Teknologi	Implementasi	Dampak	Kendala
1	Sistem Informasi Akuntansi	Terintegrasi di sebagian besar bank	Meningkatkan kecepatan pelaporan	Biaya implementasi tinggi
2	E-reporting	Digunakan dalam penyampaian ke OJK	Mempercepat validasi data	Ketergantungan pada jaringan
3	Audit Digital	Mulai diadopsi	Menurunkan risiko human error	Kurang SDM terampil
4	Portal Transparansi Publik	Disediakan oleh bank besar	Memudahkan akses publik	Belum interaktif
5	Keamanan Data	Protokol enkripsi diterapkan	Melindungi kerahasiaan data	Risiko serangan siber tinggi

Pembahasan Tabel

Pemanfaatan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelaporan keuangan bank konvensional. Penggunaan *e-reporting* dan sistem akuntansi digital mempercepat proses penyusunan serta pengiriman laporan ke regulator. Bank besar telah mengadopsi sistem integrasi data yang memungkinkan transparansi real-time, namun biaya implementasi dan pemeliharaan masih menjadi kendala utama bagi bank menengah dan kecil. Penerapan audit digital mulai diterapkan untuk menekan kesalahan manusia dan meningkatkan objektivitas hasil audit.

Meskipun kemajuan teknologi mendukung peningkatan transparansi, aspek keamanan informasi menjadi perhatian utama. Ancaman serangan siber dapat mengganggu integritas data keuangan, sehingga penerapan protokol keamanan perlu diperkuat. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar sistem digital dapat dioperasikan secara efektif. Dengan demikian, transformasi digital harus disertai kebijakan keamanan dan pengawasan yang kuat agar tujuan transparansi dapat tercapai tanpa mengorbankan kerahasiaan data nasabah.

Tabel 4. Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik.

No	Faktor	Indikator	Dampak terhadap Kepercayaan	Strategi Peningkatan
1	Keterbukaan Informasi	Laporan tahunan yang jelas	Meningkatkan kredibilitas bank	Publikasi rutin
2	Tanggung Jawab Manajemen	Komunikasi aktif dengan pemangku kepentingan	Menumbuhkan kepercayaan	Forum komunikasi
3	Audit Independen	Validasi laporan keuangan	Menjamin keandalan data	Pengawasan eksternal

4	Etika Pelaporan	Kejujuran dan integritas pelapor	Menghindari manipulasi data	Pelatihan etika
5	Partisipasi Publik	Umpan balik terhadap laporan	Meningkatkan keterlibatan sosial	Platform digital terbuka

Pembahasan Tabel

Keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas berperan besar dalam membentuk kepercayaan publik terhadap bank konvensional. Ketika informasi disajikan secara jujur dan terbuka, masyarakat cenderung memberikan penilaian positif terhadap kinerja lembaga keuangan. Peran audit independen menjadi penjamin utama atas keandalan data, sementara komunikasi manajemen dengan publik memperkuat hubungan emosional dan sosial. Dengan demikian, praktik pelaporan yang transparan dan akuntabel berimplikasi langsung terhadap reputasi dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Untuk memperkuat kepercayaan publik, bank perlu mengembangkan sistem pelaporan yang tidak hanya informatif tetapi juga interaktif. Penggunaan platform digital yang memungkinkan umpan balik publik dapat memperluas partisipasi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga keuangan. Peningkatan etika pelaporan melalui pelatihan rutin juga diperlukan untuk menjaga integritas data. Dengan sinergi antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, bank konvensional dapat membangun sistem keuangan yang lebih kredibel dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki peran sentral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap bank umum konvensional. Meskipun penerapannya telah menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat ruang untuk peningkatan terutama dalam aspek komunikasi publik, audit digital, dan pembaruan etika profesi. Penguatan teknologi informasi dan sistem pengawasan internal dapat menjadi strategi efektif dalam memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Dengan demikian, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga komitmen moral untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih terbuka, jujur, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al Widad, N. F. (2025). Implementasi akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai upaya peningkatan transparansi pada lembaga publik. *Scientific Journal of Research*, 8(4), 112–123. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1292>

- Ameliyaningsih, T. (2025). The mediating role of transparency and accountability in the relationship between financial reporting quality and organizational performance. *ISC-BEAM Journal*, 5(2), 44–57. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/isc-beam/article/view/52020>
- Beyer, A., & Dautović, E. (2024). Bank transparency and market efficiency (ECB Working Paper No. 3031). *ECB Working Paper Series*, 1–42. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5144229>
- Chen, Q., Goldstein, I., Huang, Z., & Vashishtha, R. (2022). Bank transparency and deposit flows. *Journal of Financial Economics*, 146(2), 475–501. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2022.07.009>
- Hrytsenko, L. (2024). Assessment of the level of information transparency of banks: Methodology and application. *Financial Communication and Transparency Journal*, 6(59), 88–101. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.59.2024.4619>
- Jiang, L. (2022). Deposit supply and bank transparency. *Management Science*, 68(7), 5020–5041. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2021.4012>
- Kartiko, N. D. (2024). The moderating role of corporate governance on green banking disclosure in Indonesia. *International Journal of Finance Studies*, 4(1), 33–47. <https://ojkinstitute.id/index.php/ijfs/article/view/43>
- Kim, J., Kim, M., & Kim, Y. (2020). Bank transparency and the market's perception of bank risk. *Journal of Financial Services Research*, 58(2), 115–142. <https://doi.org/10.1007/s10693-019-00323-7>
- Li, Y. (2020). Does bank transparency benefit from the Volcker Rule? *Accounting & Finance*, 60(4), 4051–4084. <https://doi.org/10.1111/acfi.12476>
- Muliani, R. H. (2025). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada lembaga keuangan: Studi kasus dan implikasi. *BIMA: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 55–68. <https://rayyanjurnal.com/index.php/bima/article/download/5053/pdf>
- Suryanto, P. D. (2024). Penerapan akuntansi perbankan dan transparansi pelaporan pada institusi keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 221–234.
- Winoto, S. A. (2024). Corporate governance and financial transparency: Evidence from Indonesian companies. *Akuditi: Jurnal Akuntansi dan Audit*, 3(2), 88–102. <https://doi.org/10.14710/jaa.21.2.84-102>
- Yulianti, D. (2025). Monitoring transparency and accountability in local government financial processes: The role of administrative systems. *Proceedings of the II Conference on Social Governance*, 2(1), 75–84. <https://iicis.fisip.unila.ac.id/index.php/web/article/download/71/64>
- Zhu, X. (2023). The impact of annual reports' transparency and comment letters on corporate outcomes. *Journal of Accounting & Public Policy*, 42(3), 215–232. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2023.106018>
- Zubaidah, A. N. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *MEA Journal*, 7(2), 189–200. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3475>